

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKJIP)

**Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Kabupaten Sumenep**

**Tahun Anggaran 2023**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMENEP merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan

pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Februari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP

**R.TITIK SURYATI, SH., M.H**  
Nip. 19660409 199302 2 002  
Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

# **BAB I PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, terdapat tiga fungsi yang melekat pada kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah), dan selaku Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ketiga fungsi tersebut di atas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Sumenep selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan, keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumenep berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

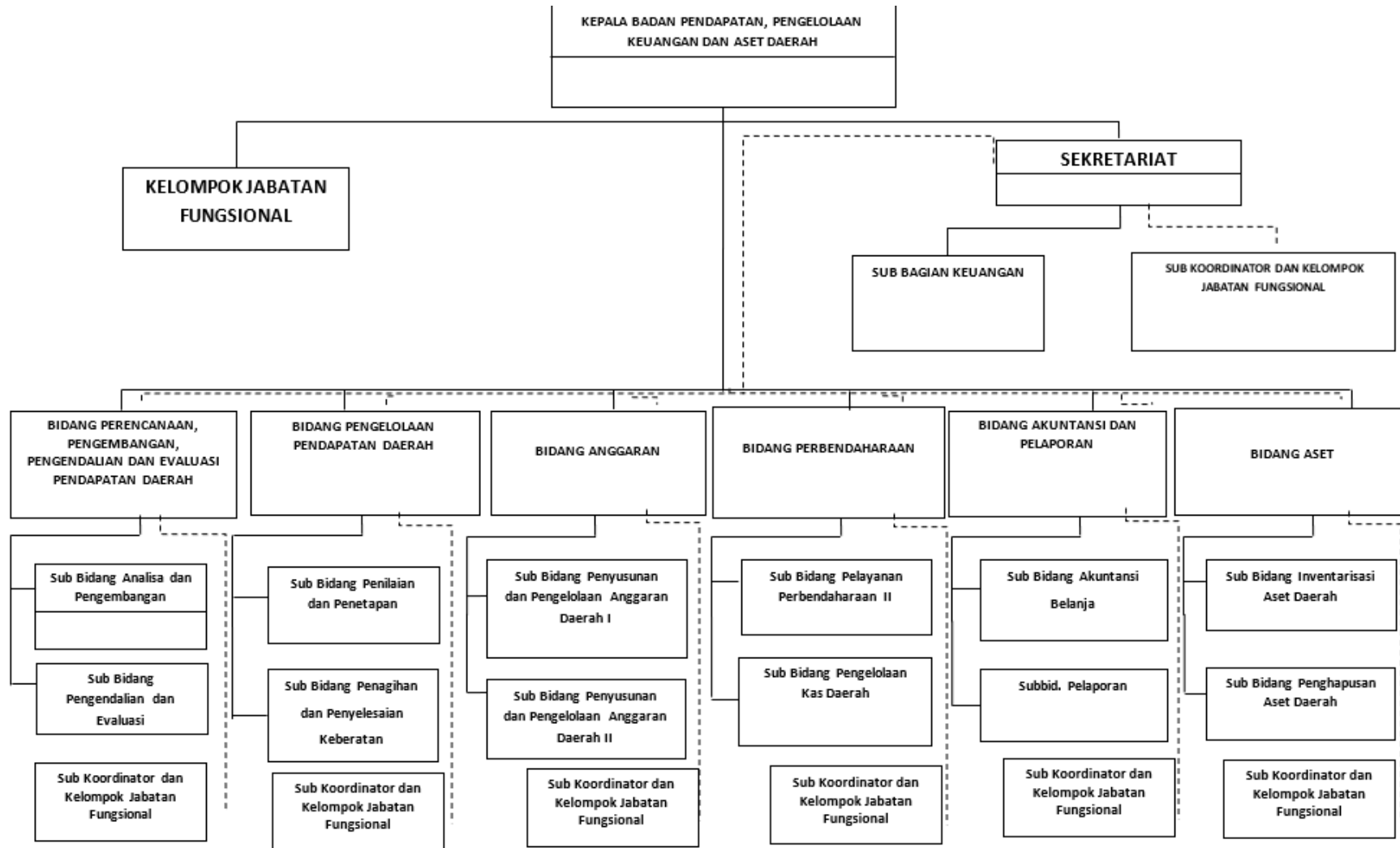
1. Penyusunan dan Pengkoordinasian Program Kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
2. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan Program dan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Keuangan;
4. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Aset;
5. Pelaksanaan Program dan Kebijakan teknis di Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
6. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )
7. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
8. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )
9. Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang milik Daerah;
10. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep.



Gambar 1.1.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Penerimaan PAD kabupaten Sumenep ;
2. Mempertahankan Opini WTP atas Audit BPK-RI, Persentase terhadap tindak lanjut atas temuan temuan BPK dari tahun ke tahun.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Penerimaan PAD kabupaten Sumenep;
2. Mempertahankan Opini WTP atas Audit BPK-RI, Persentase terhadap tindak lanjut atas temuan temuan BPK dari tahun ke tahun.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- BAB I           PENDAHULUAN**  
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II           PERENCANAAN KINERJA**  
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**  
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV          PENUTUP**

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**

**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggap, dan Inovatif	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Opini Atas Audit BPK

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melayani Masyarakat			

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### **1. Tujuan dan Sasaran Renstra**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2.5%	5%	5%	5%	5%
2	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	87%	88%	89%	90%	91%

*Sumber : Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026*

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1.1. Persentase Pertumbuhan PAD	%	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	$10\% - \left( \frac{100\% - \% \text{capaian}}{10\%} \right)$	RENSTRA BPPKAD 2021-2026
2	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	2.1 Opini atas Audit BPK	WTP	Laporan keuangan dapat dikatakan transparan dan akuntabel tepat waktu,sesuai dengan SAP dan opini yang disampaikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian.	Opini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK	RENSTRA BPPKAD 2021-2026

		2.1	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	Menindak lanjuti setiap temuan BPK RI terkait dengan temuan atas SPI dan kepatuhan atas peraturan-perundang-undangan yang berlaku ( LHP BPK RI terhadap LKPD ).	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan BPK}} \times 100\%$	RENSTRA BPPKAD 2021-2026
--	--	-----	----------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun

2023

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten**  
**Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	5
2	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transpara	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP
			Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	%	88

*Sumber : Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023*

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6

1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	%	5	5
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD .....	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	WTP	WTP	WTP
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	88	88	88

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep :

**Tabel 2.6**  
**Program dan Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	61.155.827.526	62.565.816.062

2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>5.336.900</b>	<b>5.336.900</b>
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.709.200	3.709.200
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.627.700	1.627.700
5	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>55.480.366.112</b>	<b>55.540.347.585</b>
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	55.451.587.752	55.576.370.613



7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.778.360	28.778.360
8	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>41.180.000</b>	<b>132.888.200</b>
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	200 stel	200 stel	-	91.708.200
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	26.750.000	26.750.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	14.430.000	14.430.000
12	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	<b>10 Paket</b>	<b>10 Paket</b>	<b>3.915.136.947</b>	<b>4.116.787.827</b>

13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	30.220.183	30.220.183
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	20 Paket	27.673.717	32.166.997
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3.104.621.607	3.289.571.607
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.666.200	27.394.800
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	146.785.440	146.785.440
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	<b>234.382.000</b>	<b>234.382.000</b>
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	348.787.800	356.266.800
20	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>385.936.788</b>	<b>1.101.235.307</b>

21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					27.750.000
22	Pengadaan Mebel					64.755.069
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	385.936.788	1.008.730.238
22	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>430.430.520</b>	<b>499.147.128</b>
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	430.430.520	<b>499.147.128</b>
24	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>15 Unit</b>	<b>15 Unit</b>	<b>897.440.259</b>	<b>1.105.271.727</b>
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	250.882.050	250.882.050
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	20 Unit	450.983.290	515.009.670

		yang dipelihara				
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	195.574.919	339.380.007
28	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	<b>558.670.192.800</b>	<b>585.433.474.804</b>
29	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Rencana anggaran yg disusun</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>780.442.735</b>	<b>586.644.047</b>
30	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.116.880	56.025.503
31	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	168.331.700	47.883.488
32	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	7.051.608	7.051.608
33	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	10.601.388	10.601.388

34	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	239.054.500	262.587.352
35	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	155.286.659	182.814.092
36	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.680.616	19.680.616
37	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>387.163.447</b>	<b>356.243.742</b>
38	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	51.002.680	42.809.680
39	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	183 Dokumen	14.092.000	6.645.000

40	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	44.490.000	44.490.000
41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	39.080.000	39.080.000

42	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	95 %	95 %	228.134.467	212.854.762
43	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	10.364.300	10.364.300
44	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>	100 %	100 %	<b>520.237.572</b>	<b>504.218.100</b>
45	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	8 Laporan	84.545.172	84.544.900

46	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	<b>3 Laporan</b>	<b>3 Laporan</b>	189.877.500	181.130.600
47	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	52.053.750	52.053.750



48	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	145.278.650	138.006.450
49	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	35 Orang	35 Orang	48.482.500	48.482.400
50	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>556.962.668.430</b>	<b>583.986.368.915</b>

51	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	537.085.071.430	572.241.477.439
52	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000.000	6.103.089.265
53	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	4.877.597.000	5.641.802.220
54	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	<b>2.712.957.142</b>	<b>1.538.073.400</b>
55	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	<b>2.712.957.142</b>	<b>1.538.073.400</b>
56	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	229.600.000	204.329.000
57	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	56.287.100	56.287.100
58	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	76.469.200	76.856.000

59	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	2.006.212.642	856.213.100
60	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	344.388.200	344.388.200
61	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	<b>5 %</b>	<b>5 %</b>	<b>2.109.408.370</b>	<b>2.765.094.480</b>
62	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>5 %</b>	<b>5 %</b>	<b>2.109.408.370</b>	<b>2.765.094.480</b>
63	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	48.127.000	78.467.000
64	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	175.872.000	176.372.000

65	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	236.413.000	170.273.000
66	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	86.603.000	86.603.000
67	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan	99.970.000	147.250.000
68	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	914.919.370	1.236.245.000
69	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Obyek Pajak	50 Obyek Pajak	236.445.000	680.989.980
70	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	65.690.000	74.970.000
71	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.545.000	33.972.500

		Penagihan Pajak Daerah				
72	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	27.300.000	8.250.000
73	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	138.692.000	34.142.000
74	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan	50.832.000	37.560.000

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten**  
**Sumenep Tahun 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	5%	21%	420%	Sangat Tinggi	LRA Kabupaten Sumenep

2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungja waban APBD	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	WTP	* Menunggu Audit BPK	* Menunggu Audit BPK	* Menunggu Audit BPK	* Menunggu Audit BPK
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	88%	82%	93,18%	Sangat Tinggi	
Rata-Rata Capaian Kinerja					256,59%	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa Tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan PAD dengan target 5% terealisasi 21% atau capaian atas target sebesar 420%, sehingga dikategorikan “sangat tinggi”.

Sedangkan Sasaran dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Opini Atas Audit WTP BPK-RI dengan target ... terealisasi .... atau capaian atas target ...
2. Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK dengan Target 88% terealisasi 82% atau capaian atas target sebesar 93,18%, sehingga dikategorikan “sangat tinggi”.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 256,59 dengan kategori “sangat tinggi”.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	2.5%	2.625%	105%	5%	21%	420%
2.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	WTP	WTP	WTP	* Menunggu Audit BPK	* Menunggu Audit BPK	* Menunggu Audit BPK
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	87%	80%	91%	88%	82%	93,18%

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” Tahun 2023 sebesar 420% dan pada Tahun 2022 tercapai sebesar 105%, dengan demikian maka tingkat capaian kinerja tujuan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 315% dibandingkan Tahun 2022.

Sedangkan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD” dengan Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK Pada Tahun 2023 tercapai sebesar 93,18%, dengan demikian maka tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibandingkan Tahun 2022 dan dikategorikan “sangat tinggi”.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	21%	25%	420%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	* Menunggu Audit BPK	WTP	
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	82%	91%	90%

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa dari realisasi kinerja Tujuan “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan sebesar 420% (kategori “sangat tinggi”).

Sedangkan realisasi kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD” Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Tahun 2026 mencapai tingkat kemajuan 90% (kategori “sangat tinggi”), dengan demikian maka target kinerja yang harus dipenuhi 3 tahun ke depan sebesar 9 atau sebesar 10% dari target Tahun 2026.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten**  
**Sumenep lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$

Keberhasilan kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk tingkat keberhasilan kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pengkategorian Tingkat Keberhasilan Kinerja**

No.	Kategori/Interpretasi	% Capaian
1	Sangat Berhasil	$>100$
2	Berhasil	$91 \leq 100$
3	Cukup Berhasil	$76 \leq 90$
4	Tidak Berhasil	$66 \leq 75$
5	Sangat Tidak Berhasil	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	5%	21%	420%	Sangat Berhasil
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	Opini Atas Audit WTP BPK-RI	WTP	* Menunggu Audit BPK	* Menunggu Audit BPK	*Menunggu Audit BPK
		Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK	88%	88%	100%	Berhasil

Uraian Penjelasan Tabel:

Pada Tabel 3.7 dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tercapainya target kinerja Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan terdapat faktor pendukung yaitu:
  - 1) Adanya pemutakhiran data Wajib Pajak sehingga meningkatkan penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah.
  - 2) Terdapat pemberlakuan tarif berlaku normal pasca pandemi *covid-19* dan meningkatnya potensi Wajib Pajak baru.

- 3) Peningkatan terhadap tingkat okupasi sehingga meningkatkan pendapatan atas pajak hotel.
- 4) Penambahan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RS Abuya dan peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- 5) Terdapat kebijakan untuk melakukan pembayaran sistem *online* atau QRIS pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).
- 6) Inovasi pencatatan pembayaran pendapatan asli daerah melalui aplikasi e-PAD yang dapat memudahkan pengguna dan instansi terkait dalam melakukan pencatatan atas penerimaan daerah.

Selain hal tersebut di atas, untuk selanjutnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah yang mengatur mengenai tarif, pemungutan dan pengenaan pajak dan retribusi dalam rangka optimalisasi penagihan, insentif keringanan pajak dan penghapusan pajak daerah.

2. Tercapainya target kinerja Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD dengan dua indikator yaitu “opini atas Audit WTP BPK RI” namun belum rilis menunggu hasil audit BPK dan “Persentase Tindak lanjut terhadap Temuan BPK-RI”, terdapat faktor-faktor pendukung sebagai berikut:
  - 1) Koordinasi antara APIP, Pihak Intern dan Instansi terkait atas tindak lanjut temuan BPK Ri sehingga tindak lanjut tersebut dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.
  - 2) Penetapan *Dateline* atas Tindak Lanjut Temuan sehingga tercapai sesuai waktu yang ditentukan.
  - 3) Tindak Lanjut atas Perumusan Kebijakan yang menjadi temuan, misalnya perumusan dan pemberlakuan Peraturan Bupati tentang Properti Investasi dan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  - 4) Jika temuan terkait Ganti Kerugian Daerah, maka tindak lanjut untuk segera melakukan pengembalian ke Kas Daerah.

- 5) Melakukan Pemantauan, Rakor Kunjungan jika diperlukan kepada instansi dan/atau OPD terkait apabila terdapat temuan mengenai program kerja pada instansi dan/atau OPD terkait.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan/ Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	Meningkat nya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	<b>100 %</b>	100	100%	Berhasil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	<b>14 Dokumen</b>	14	100%	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	100%	Berhasil
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>2 Laporan</b>	2	100%	Berhasil



		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	100%	Berhasil
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	4	100%	Berhasil
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	200 stel	200	100%	Berhasil
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5	100%	Berhasil
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20	100%	Berhasil
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	<b>10 Paket</b>	10	100%	Berhasil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10	100%	Berhasil
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	20	100%	Berhasil
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10	100%	Berhasil
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	100%	Berhasil
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	100%	Berhasil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	100%	Berhasil
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100	100%	Berhasil
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>4 Unit</b>	6	150%	Sangat Berhasil

		<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1	100%	Berhasil
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	12 Unit	12	100%	Berhasil
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55	100%	Berhasil
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	4	100%	Berhasil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Dokumen	4	100%	Berhasil
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>15 Unit</b>	15	100%	Berhasil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40	100%	Berhasil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20	100%	Berhasil
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2	100%	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>92 %</b>	92	100%	Berhasil
	10111111	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Rencana anggaran yg disusun</b>	<b>100 %</b>	100	100%	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2	200%	Sangat Berhasil

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2	200%	Sangat Berhasil
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51	100%	Berhasil
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51	100%	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3	150%	Sangat Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	4	200%	Sangat Berhasil
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>	<b>95 %</b>	95	100%	Berhasil
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	6	100%	Berhasil
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	183	100%	Berhasil
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12	100%	Berhasil

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12	100%	Berhasil
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	95 %	95	100%	Berhasil
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	35	100%	Berhasil
		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>	100 %	100	100%	Berhasil
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	8	100%	Berhasil

		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	<b>3 Laporan</b>	3	100%	Berhasil
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1	100%	Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	35 Orang	35	100%	Berhasil
		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>	<b>95 %</b>	95	100%	Berhasil
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	100	100%	Berhasil
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1	100%	Berhasil

		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1	100%	Berhasil
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>92 %</b>	92	100%	Berhasil
		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>92 %</b>	92	100%	Berhasil
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	100%	Berhasil
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10	100%	Berhasil
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
3	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	<b>5 %</b>	4,6	92%	Berhasil
		<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>5 %</b>	4,6	92%	Berhasil
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1	100%	Berhasil

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1	100%	Berhasil
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	7	100%	Berhasil
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1	100%	Berhasil
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Obyek Pajak	50	100%	Berhasil
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1	100%	Berhasil
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	Berhasil
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen	24	100%	Berhasil
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	-	0%	Sangat Tidak Berhasil

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep” target kinerja tercapai 100%. Hal ini didukung oleh seluruh kegiatan/sub kegiatan penunjang dengan rata-rata target kinerja tercapai 100%.

2. Program “Pengelolaan Keuangan Daerah” target kinerja tercapai 100%. Hal ini didukung oleh seluruh kegiatan/sub kegiatan penunjang dengan rata-rata target kinerja tercapai 100%.
3. Program “Pengelolaan Barang Milik Daerah” target kinerja tercapai 100%. Hal ini didukung oleh seluruh kegiatan/sub kegiatan penunjang dengan rata-rata target kinerja tercapai 100%.
4. Program “Pengelolaan Pendapatan Daerah” target kinerja tercapai 92%. Dari 12 Sub Kegiatan terdapat 2 Sub Kegiatan penunjang yang capaian kinerjanya di atas 50%, 1 Sub Kegiatan penunjang yang capaian kinerjanya dibawah 50% dan terdapat Sub Kegiatan yang tidak terlaksana yaitu “Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Faktor-faktor penghambat yaitu diantaranya:
  - 1) Tidak terdapat SOP pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - 2) Tidak terdapat Tim Pemeriksa Pajak. Proses Pengawasan bersama telah diajukan kepada DJPK atas usulan BPPKAD sebagaimana hasil tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama antara DJPK dengan Kabupaten Sumenep, namun belum terdapat konfirmasi atas hal tersebut.
  - 3) Belum terbentuknya Tim Intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan menjadi dasar *monitoring* dalam proses pengawasan pemungutan pajak daerah.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.565.816.062,00	46.895.440.889,00	74,95%



2	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	585.433.474.804,00	579.792.638.969,00	99,04%
3	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.538.073.400,00	1.230.074.521,00	79,98%
4	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.765.094.480,00	2.399.072.121,00	86,76%
<b>Rata-rata Capaian Anggaran Program dan Kegiatan</b>				<b>85,18%</b>

Berdasarkan Tabel 3.8 untuk mencapai sasaran strategis tersebut telah dialokasikan sejumlah anggaran. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran yaitu sebesar 14,82% dengan rata-rata capaian tingkat realisasi sebesar 85,18%.

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	5%	21%	420%	2.765.094.480,00	2.399.072.121,00	86,76	13,24
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban APBD	WTP 88%	* Menunggu Audit BPK 82%	* Menunggu Audit BPK 93,18%	649.537.364.266,00	627.918.154.379,00	96,67	3,33

Uraian penjelasan tabel:

Tujuan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian capaian kinerja sebesar 420% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 86,76%. Atas hal tersebut, maka terdapat tingkat efisiensi sebesar 13,24% sehingga dikategorikan “efisien”.

Sasaran strategis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian capaian kinerja sebesar 93,18% dan capaian penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,33%. atas hal tersebut, maka terdapat tingkat efisiensi sebesar 96,67% sehingga dikategorikan “efisien”.

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran masing-masing program/kegiatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100	100%	62.565.816.062,00	46.895.440.889,00	74,95	25,05

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>14 Dokumen</b>	14	100%	5.336.900,00	2.175.250,00	40,76	59,24
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100%	3.709.200,00	1.721.500,00	46,41	53,59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	100%	1.627.700,00	453.750,00	27,88	72,12
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>2 Laporan</b>	2	100%	55.605.148.973,00	40.790.194.377,00	73,36	26,64
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	100%	55.576.370.613,00	40.763.625.377,00	73,35	26,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1 Dokumen	1	100%	28.778.360,00	26.569.000,00	92,32	7,68

		Keuangan SKPD							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	4	100%	132.888.200,00	100.592.000,00	75,70	24,30
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	200 stel	200	100%	91.708.200,00	91.392.000,00	99,66	0,34
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5	100%	26.750.000,00	5.600.000,00	20,93	79,07
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20	100%	14.430.000,00	3.600.000,00	24,95	75,05
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>	<b>10 Paket</b>	10	100%	4.116.787.827,00	3.608.246.743,00	87,65	12,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10	100%	30.220.183,00	20.245.000,00	66,99	33,01
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket	20	100%	32.166.997,00	15.346.700,00	47,71	52,29

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10	100%	3.289.571.607,00	2.960.928.491,00	90,01	9,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	100%	27.394.800,00	7.042.000,00	25,71	74,29
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	100%	146.785.440,00	102.672.838,00	69,95	30,05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	100%	234.382.000,00	207.590.676,00	88,57	11,43
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100	100%	356.266.800,00	294.421.038,00	82,64	17,36
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>4 Unit</b>	<b>6</b>	<b>150%</b>	<b>1.101.235.307,00</b>	<b>968.599.082,00</b>	<b>87,96</b>	<b>12,04</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1	100%	27.750.000,00	22.900.000,00	82,52	17,48
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	12 Unit	12	100%	64.755.069,00	44.120.000,00	68,13	31,87
	Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	55 Unit	55	100%	1.008.730.238,00	901.579.082,00	89,38	10,62

	dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa yang disediakan</b>	<b>4 Jenis</b>	4	100%	499.147.128,00	491.002.824,00	98,37	1,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Dokumen	4	100%	499.147.128,00	491.002.824,00	98,37	1,63
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>15 Unit</b>	15	100%	1.105.271.727,00	934.630.613,00	84,56	15,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40	100%	250.882.050,00	222.501.699,00	88,69	11,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20	100%	515.009.670,00	439.073.022,00	85,26	14,74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2	100%	339.380.007,00	273.055.892,00	80,46	19,54

2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	92 %	92	100%	585.433.474.804,00	579.792.638.969,00	99,04	0,96
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Rencana anggaran yg disusun</b>	<b>100 %</b>	100	100%	586.644.047,00	458.993.573,00	78,24	21,76
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2	200%	56.025.503,00	39.495.424,00	70,50	29,50
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	2	200%	47.883.488,00	38.714.900,00	80,85	19,15
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51	100%	7.051.608,00	6.550.200,00	92,89	7,11
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51	100%	10.601.388,00	6.700.200,00	63,20	36,80
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	3	150%	262.587.352,00	213.470.572,00	81,30	18,70
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	4	200%	182.814.092,00	152.066.377,00	83,18	16,82

	Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD							
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1	1%	19.680.616,00	1.995.900,00	10,14	89,86
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola</b>	<b>95 %</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>	<b>356.243.742,00</b>	<b>314.033.210,00</b>	<b>88,15</b>	<b>11,85</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	6	100%	42.809.680,00	40.138.950,00	93,76	6,24
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	183	100%	6.645.000,00	6.492.000,00	97,70	2,30
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12	100%	44.490.000,00	38.397.352,00	86,31	13,69



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12	100%	39.080.000,00	28.346.420,00	72,53	27,47
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	95 %	95	100%	212.854.762,00	190.304.188,00	89,41	10,59

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Orang	35	100%	10.364.300,00	10.354.300,00	99,90	0,10
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah</b>	100 %	100	100%	504.218.100,00	395.027.965,00	78,34	21,66
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	8	100%	84.544.900,00	83.154.400,00	98,36	1,64
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3 Laporan	3	100%	181.130.600,00	117.960.892,00	65,12	34,88

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1	100%	52.053.750,00	46.564.790,00	89,46	10,54
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	100%	138.006.450,00	100.395.033,00	72,75	27,25
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	35 Orang	35	100%	48.482.400,00	46.952.850,00	96,85	3,15
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola</b>	<b>95 %</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	<b>583.986.368.915,00</b>	<b>578.624.584.221,00</b>	<b>99,08</b>	<b>0,92</b>

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	100	100%	572.241.477.430,00	571.588.657.953,00	99,89	0,11
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1	100%	6.103.089.265,00	1.417.263.048,00	23,22	76,78
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1	100%	5.641.802.220,00	5.618.663.220,00	99,59	0,41
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>92 %</b>	92	100%	1.538.073.400,00	1.230.074.521,00	79,98	20,02
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>92 %</b>	92	100%	1.538.073.400,00	1.230.074.521,00	79,98	20,02
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1	100%	204.329.000,00	196.543.500,00	96,19	3,81
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	100%	76.856.000,00	54.402.270,00	70,78	29,22
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10	100%	856.213.100,00	838.601.376,00	97,94	2,06

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	100%	56.287.100,00	16.426.000,00	29,18	70,82
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	100%	344.388.200,00	124.101.375,00	36,04	63,96
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	5 %	4,6	53%	2.765.094.480,00	2.399.072.121,00	86,76	13,24
	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	5 %	4,6	92%	2.765.094.480,00	2.399.072.121,00	86,76	13,24
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	78.467.000,00	24.410.326,00	31,11	68,89
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	176.372.000,00	149.097.942,00	84,54	15,46
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	1	100%	170.273.000,00	126.463.375,00	74,27	25,73

		Kebijakan Pajak Daerah							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1	100%	86.603.000,00	66.795.580,00	77,13	22,87
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan	7	100%	147.250.000,00	111.040.498,00	75,41	24,59
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1	100%	1.236.245.000,00	1.200.118.500,00	97,08	2,92
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Obyek Pajak	50	100%	680.989.980,00	622.955.000,00	91,48	8,52
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1	100%	74.970.000,00	60.146.900,00	80,23	19,77
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	1	100%	33.972.500,00	31.324.000,00	92,20	7,80

		n Penagihan Pajak Daerah							
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	100%	8.250.000,00	3.360.000,00	40,73	59,27
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen	24	100%	34.142.000,00	3.360.000,00	9,84	90,16
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	-	0%	37.560.000,00	0,00	0,00	100,00

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja Program “Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah” dengan indikator “Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor” tercapai 93% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 74,95% dari pagu anggaran. Atas hal tersebut, maka terdapat efisiensi sebesar 25,05% atau senilai Rp15.670.375.173,00.
2. Kinerja Program “Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator “Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah” tercapai 82% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,04% dari pagu anggaran. Atas hal tersebut, maka terdapat efisiensi sebesar 0,96% atau senilai Rp 5.640.835.835,00.
3. Kinerja Program “Pengelolaan Barang Milik Daerah” dengan indikator “Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah” tercapai 85% dari target, sedangkan capaian

penggunaan anggaran sebesar 79,98% dari pagu anggaran. Atas hal tersebut, maka terdapat efisiensi sebesar 20,02% atau senilai Rp 307.998.879,00.

4. Kinerja Program “Pengelolaan Pendapatan Daerah” dengan indikator “Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah” tercapai 53% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 86,76% dari pagu anggaran. Atas hal tersebut, maka terdapat efisiensi sebesar 13,24% atau senilai Rp 366.022.359,00.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 420% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93.18% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 652.302.458.746 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 630.317.226.500, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 96,63% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,37%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP

**R,TITIK SURYATI, SH., M.H**

Nip. 19660409 199302 2 002

Pembina Utama Muda

**COVER PENUTUP**